

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Tahun 1999, UU Nomor 22 dan 25 diundangkan, yang tiap-tiap mengelola desentralisasi fiskal dan daerah otonomi. Di Amerika Serikat, setiap daerah maupun provinsi mempunyai keahlian guna mengatur kerabat, atas beberapa campur, federal tangan. UU diatas diperbaharui dan/atau disepakati searah perkembangan atas berlakunya UU 32 tahun 2004 serta UU 33 tahun 2004, membahas pemda dan Perimbangan keuangan oleh pemerintah daerah dan Federal. Berdasarkan hal tersebut besar kesempatan untuk memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang ada di Pemda secara efisien dan efektif., guna memacu mobilisasi social. Pertumbuhan ekonomi bisa mengerti pemda agar ikut bergabung atas partisipasi penyusunan ekonomi, guna mengelola dan memperkenalkan sumber daya relasi antar rakyat guna tugas yang akan datang, serta berdampak penyusunan ekonomin daerah.

Pemda mempunyai otoritas atas penyusunan pemerintahan individual, sesuai UU 23 Tahun 2014. Sebab demikian, pemda ditekan guna meningkatkan PAD, berasal dari pemungutan pajak Daerah, pungutan yang diuntungkan., serta inti pembagian harta Daerah yang dibedakan. Kenaikan PAD diinginkan bisa menaikkan belanja modal pemda., maka dari itu jasa layanan public untuk rakyat agar lebih positif.

Kesepadanan diantara budget daerah dengan Nasional, yang dibuat oleh UU No.33 Tahun 2004, Memberikan pusat yang tinggi dikekuasaan Pemda. Pemerintah pusat memberikan budget kepada pemda dalam menjaga keseimbangan anggaran yang disebut Transfer. Membagikan DBH inti ke proporsi daerah.. DAU merupakan dana asal yang terutama. Pemda mempunyai jalur masuk dalam sumber, daya daerah lain ke PAD, pinjaman daerah, serta yang mampu menyesuaikan syarat, misalkan pendonasian Negara federal dan Bagian.

Pemda mendonasikan uang ke APBD untuk belanja modal agar menaikkan angka fixed asset. Nilai nominal yang dikeluarkan buat belanja modal dipengaruhi karena fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi pemda dalam melaksanakan kegunaannya serta menyampaikan layanan public. Belanja kapital dirancang guna membelanja Gedung, peralatan, infrastruktur, dan fixed asset pada pemda. Sebab pemda wajib merubah perkiraan belanja layanan umumtas mereka agar meningkatkan kualitas menurut kelengkapan,

Seperti kasus didalam penelitian ini yaitu pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta Kabupaten Serdang Bedagai.

Pada kabupaten Labuhanbatu Selatan, dau, pad dan pertumbuhan ekonomi seluruhnya meningkat dari tahun 2018 ke 2019, dengan nilai PDRB sebesar Rp. 4.575.303, PAD meningkat

sebesar Rp. 1.773.667.765, dan peningkatan DAU sebesar Rp. 18.751.656.000 dibandingkan belanja modal menurun Rp. 31.405.277. Pada Kabupaten Serdang Bedagai (DAK) mengalami penurunan senilai Rp. 53.754.406.000 dari tahun 2018 terhadap 2019, walaupun belanja modal daerah mengalami peningkatan senilai Rp. 126.018.987.504. Belanja modal daerah wajib naik bersamaan dengan DAK, PAD dan pertumbuhan Ekonomi. seperti itu sebaliknya. Penulis berharap mengerti apakah terdapat dampak PAD, DAU, dan DAK serta pertumbuhan Ekonomi dengan distribusi anggaran belanja modal.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Teori Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

“Belanja Daerah digunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Daerah. Manajemen keuangan. Ini termasuk meningkatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, layanan sosial dan fasilitas umum, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Pembangunan infrastruktur pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah untuk perbaikan sarana dan prasarana. Devi (2013) mengklaim bahwasannya peningkatan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi belanja modal.

1.2.2 Teori Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah sangat penting bagi daerah untuk membayar pengeluarannya, terutama belanja modal. Berbagai sumber pendapatan asli daerah tersedia, seperti hasil pajak dan retribusi daerah, serta akibat pengelolaan kekayaan daerah. Disebutkan dalam Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12 Tahun 2019) bahwasannya APBD dihasilkan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas daerah.

Nopitasari (2017) menemukan bahwasannya keterkaitan antara elemen pendapatan daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap variabel lain yang dievaluasi. Aditya dan Dirgantari (2017) menemukan bahwasannya pendapatan daerah memiliki pengaruh terhadap variabel belanja modal.

1.2.3 Teori Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

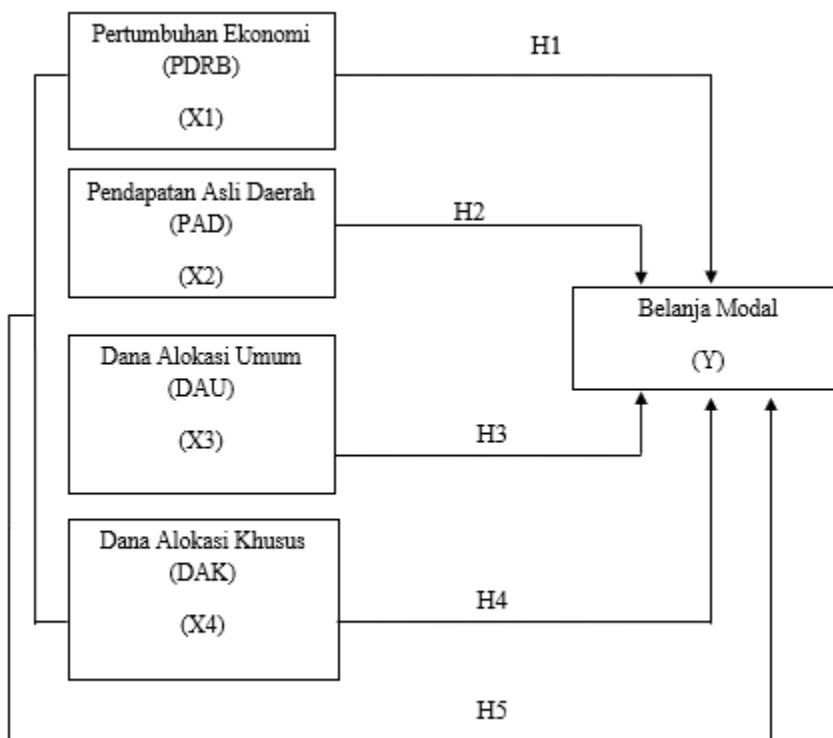
Belanja desentralisasi dibiayai oleh dana alokasi umum (DAU), yaitu dana APBN yang diberikan kepada daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan. Karena desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya mereka dengan lebih baik dan tidak terlalu bergantung pada Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (DAU). Dengan transfer DAU dari pemerintah pusat, daerah akan memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menggunakan PAD untuk mendukung inisiatif permodalan

yang membantu pemerintah meningkatkan pelayanan publik. Menurut analisis empiris Arwati dan Hidayati (2013), Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

1.2.4 Teori Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Uang Alokasi Khusus adalah dukungan perimbangan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai inisiatif yang terkait dengan tantangan daerah dan tujuan pembangunan nasional. Tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan untuk program khusus oleh pemerintah daerah (Ardhini, 2011). DAK digunakan untuk operasi investasi jangka panjang termasuk membangun, membeli, dan merenovasi infrastruktur fisik untuk layanan publik seperti instalasi pengolahan air. Penggunaan DAK untuk tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan belanja modal dan dengan demikian meningkatkan pelayanan publik. Yang lain merasa DAK adalah cara yang baik untuk mendanai belanja modal (Pohan, 2018). Penelitian ini mempertunjukkan adanya hubungan antara uang transfer pemerintah pusat (DAK) dengan anggaran belanja daerah yang disalurkan melalui belanja modal.

1.3 Kerangka Pemikiran



1.4 Hipotesis Penelitian

- H1: Pertumbuhan Ekonomi berdampak positif terhadap Belanja Modal
- H2: Pendapatan Asli Daerah berdampak Positif terhadap Belanja Modal.

- H3 : Dana Alokasi Umum berdampak Positif terhadap Belanja Modal
- H4: Dana Alokasi Khusus berdampak Positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.
- H5: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara Simultan berdampak Positif terhadap Belanja Modal.